



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT  
DINAS TENAGA KERJA DAN  
PERINDUSTRIAN



Rencana Kerja Perubahan  
Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

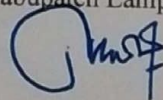
Dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat 2023-2026, disusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 untuk memberikan arahan yang memudahkan pencapaian target sasaran secara terukur.

Renja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diberi amanat untuk menyusun Rencana Kinerja yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja SKPD ini menggambarkan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan telah diselaraskan dengan program Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta memperhatikan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan Bidang Ketahanan Pangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan masukan dan saran yang bersifat membangun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya. Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak diucapkan terimakasih.

Liwa, April 2025  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kabupaten Lampung Barat



**SRI WIYATMI**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 196808091997032002

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN -----</b>	
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum-----	3
1.3 Maksud dan tujuan-----	4
1.4 Sitematika Penulisan-----	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah -----	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah-----	7
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah -----	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD -----	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat -----	36
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN -----</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional -----	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD -----	39
3.3 Program dan kegiatan -----	39
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH -----</b>	44
<b>BAB V PENUTUP -----</b>	51
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran I Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
Lampiran II Rancangan Awal RKPD 2025	

**1.1 Latar Belakang**

Dokumen Renca Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagai sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sesuaidengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan amanah yang diemban Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Pada Rancangan Akhir RPJMD 2023-2024, kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya nilai investasi daerah, meningkatnya kuantitas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan. Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah, demikian juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Lampung Barat berkewajiban menyusun terhadap Rencana Strategis tahun 2023-2024. Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 butir 29, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini didasari Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : "Renstra-PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Srategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 040-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Tenaga dan Perindustrian Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Maksud disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat 2025 adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 1 tahun kedepan dengan berpedoman pada. RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rennca Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

1. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat;
2. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat beserta seluruh unit kerjanya;
3. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam mengambil keputusan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENJA ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAUAN 1**

2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

**A. TUJUAN**

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mencapainya maka tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah :

1. **Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**
2. **Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita**

**A. SASARAN**

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja

2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASA RAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
			2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	77.01 %	82.02 %	87.02 %	92.02 %
	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	360.376	365.544	372.855	380.312

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai

program dan kegiatan dengan jumlah program 5 program dan jumlah kegiatan termasuk rutin sebanyak 13 kegiatan. Dan 36 Sub Kegiatan

Alokasi dana Tahun 2025 sebelum perubahan Untuk Belanja Langsung sebesar Rp4.269.896.750 (Belanja Pegawai Rp1.966.888.950, Belanja Barang dan Jasa Rp1.969.707.596, Belanja Hibah Rp320.000.000,-Belanja Modal Rp13.300.000) terrealisasi sebesar Rp.748.649.347,-(Belanja Pegawai Rp.425.170.360.-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 150.514.547,-, Belanja Hibah Rp.174.897,500-Belanja Modal Rp.00.00 ) atau sebesar 17.53 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023+2024	Target Kinerja DPA Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025	
					Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	92.02	82.83 %	87.02 %	82.83 %	82.83 %	82.83 %	82.83 %
Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Kopras, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri	380.312	413490	372.855	413490	100%	413490	109%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80 %	78	78	78	0%	78	97.5%

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	48 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	25%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	25%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0%	1 Dokumen	25%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	25%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0%	1 Dokumen	25%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		0%	1 Laporan	25%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	25%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	25%	4 Dokumen	25%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4 Bulan	4 Bulan	25%	12 Orang/bulan	25%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		0%	1 Laporan	25%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		0%	2 Laporan	25%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								

	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0%	1 Dokumen	25%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0%	1 Dokumen	25%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	54 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen		0%	18 Dokumen	25%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		1 Orang		0%		0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	15 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	25%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	25%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	25%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	25%
Fasilitasi Kunjungan Tamu								

	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	25%	12 Laporan	25%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	25%	12 Laporan	25%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	25%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	25%	12 Laporan	25%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	25%	12 Laporan	25%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	25%	12 Laporan	25%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	15 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	25%	5 Unit	25%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25%		25%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	25%	3 Unit	25%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	25%	4 Unit	25%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	4 Unit	80%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	120 Orang	40 Orang	20 Orang	-	0%	40 Orang	33%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	120 Orang	40 Orang	20 Orang	-	0%	40 Orang	33%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		120 Orang	40 Orang	20 Orang	-	0%	40 Orang	33%
	Jumlah Tenaga Kerja yang Merupakan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120 Orang	40 Orang	20 Orang	-	0%	40 Orang	33%
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						0%		0%

	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	50%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	97.02 %	83.89%	87.02	83.89%	75%	83.89%	75%
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan perluasan kesempatan kerja	990 Orang	478 Orang	330 Orang	125 Orang	25%	478 Orang	58%
Pelayanan antar Kerja								
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	990 Orang	478 Orang	330 Orang	125 Orang	25%	478 Orang	58%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	990 Orang	478 Orang	330 Orang	125 Orang	25%	478 Orang	58%
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online								

	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	990 Orang	478 Orang	330 Orang	125 Orang	25%	478 Orang	58%
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	78 Orang	10 Orang	78 Orang	100%	78 Orang	100%
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)								
	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	78 Orang	10 Orang	78 Orang	100%	78 Orang	100%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Perlindungan tenaga Kerja	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		0%	1 Laporan	20%

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		0%	1 Laporan	20%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		0%	1 Laporan	20%
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		0%	1 Laporan	20%

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0%	1 Laporan	25%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Perkara	1 Perkara	1 Perkara		0%	1 Perkara	25%
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara	1 Perkara	1 Perkara		0%	1 Perkara	25%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota								
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga		0%	1 Lembaga	25%
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		2783 Orang	2783 Orang	2783 Orang	2783 Orang	100%	2783 Orang	100%

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	4 % 8 %	4 % 8 %	4 % 8 %	4 % 8 %	5%	4 % 8 %	5%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		0%	2 Dokumen	25%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0%	1 Dokumen	25%

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	25%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pertumbuhan IKM formal	10 %		10 %		0%		5%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah izin yang diterbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang diterbitkan	10 %		10 %		0%		5%
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								

	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%
--	--	-----------	--	-----------	--	----	--	----

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN ANGGARAN

## 3.1.1. ANGGARA

Pada perinsipnya perubahan anggaran pada sub kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian hanya Penataan pada anggaran yang sudah ada meskipun terdapat 1 sub kegiatan yang baru dimunculkan hasil dari penataan anggaran yang ada di Dinas tenaga Kerja dan perindustrian. Sub kegiatan yang baru tersebut berdasarkan sekala kebutuhan yang mendesak pada perangkat daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut

1. Jumlah anggaran Belanja pada RKP/ Renja Murni tahun 2025 sebesar Rp.12.000.000.000,-
2. Jumlah anggaran belanja pada APBD Murni Tahun 2025 Sebesar Rp4.269.896.546
3. Jumlah sub kegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan 2025 dibandingkan dengan Renja Murni 2025 Sebanyak 26 sub kegiatan yaitu :

URAIAN	PAGU MURNI 2025	PENGURANGAN	PAGU PERUBAHAN
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4.269.896.546	536.903.990	3.732.992.556
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.403.877.750	131.687.400	2.272.190.350
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.714.000,00	25.489.000,00	28.225.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.124.000	11.594.000	13.530.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.590.000	6.920.000	2.670.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perubahan SKPD	5.000.000	2.500.000	2.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	600.000	1.400.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	500.000	500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	500.000	500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	2.875.000	7.125.000,00
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.969.388.950,00

	1.971.888.950	2.500.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.966.888.950		1.966.888.950,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000	500.000	500.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	1.000.000	1.000.000,00
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.490.000	4.245.000	9.245.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.490.000	4.245.000	4.245.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000		5.000.000,00
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.929.800	50.743.400	75.186.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		10.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.852.800	8.926.400	8.926.400,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000		7.500.000,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	6.943.000		6.943.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.634.000	41.817.000	41.817.000,00
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.095.000	14.460.000	135.635.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000		5.000.000,00
Penyediaan jasa sumberdaya air, listrik dan telepon	71.400.000		71.400.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.695.000	14.460.000	59.235.000,00
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.760.000	34.250.000	54.510.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.800.000	34.250.000	38.550.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.960.000		5.960.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000		10.000.000,00
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>321.700.700,00</b>	<b>107.768.400,00</b>	<b>213.932.300,00</b>
1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			0,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	290.731.500	100.205.500,00	190.526.000,00
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	30.969.200	7.562.900,00	23.406.300,00
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>159.425.200,00</b>	<b>84.030.100,00</b>	<b>75.395.100,00</b>
1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		39.526.400,00	
Pelayanan antar Kerja	77.012.800	39.526.400,00	37.486.400,00
2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		12.331.200,00	

	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	22.412.400	12.331.200,00	10.081.200,00
3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		22.172.500,00	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	60.000.000	32.172.500,00	27.827.500,00
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>671.738.996,00</b>	<b>71.589.200,00</b>	<b>600.149.796,00</b>
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.705.000,00	18.504.500,00	14.200.500,00
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	32.705.000	18.504.500	14.200.500,00
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	639.033.996	53.084.700	585.949.296,00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.886.600	18.526.100	14.360.500,00
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	42.044.000	23.284.800	18.759.200,00
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	564.103.396	11.273.800	552.829.596,00
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>713.153.900,00</b>	<b>141.828.890,00</b>	<b>527.934.510,00</b>
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	653.976.900,00	126.042.390,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	206.461.900	42.494.770,00	163.967.130,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	127.515.000	33.547.620	93.967.380,00
	Hibah	320.000.000	50.000.000	270.000.000,00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>59.177.000</b>	<b>15.786.500</b>	<b>43.390.500,00</b>
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	59.177.000	15.786.500	43.390.500,00
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	59.177.000	15.786.500,00	43.390.500,00

Rincian perubahan Rencana Kerja Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 2 dokumen rencana kerja perubahan 2025.

### 3.1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada urusan pemerintah yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
2. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
3. Program penempatan tenaga kerja
4. Program hubungan industrial
5. Program perencanaan dan pembangunan industri
6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program pada tahun 2025 yang termuat dalam dokumen rencana kerja perubahan adalah sebagai berikut:

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2	07	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	07	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja

2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Program unggulan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustriaan, serta mengakomodir penyelesaian masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat.

Keberhasilan pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat tidak terlepas dari dukungan pendanaan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pendanaan tersebut merupakan stimulator (pengungkit) untuk tumbuhnya investasi swasta dan swadaya masyarakat yang bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Agar Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh aparaturnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap *stakeholder* baik pusat, provinsi maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.









